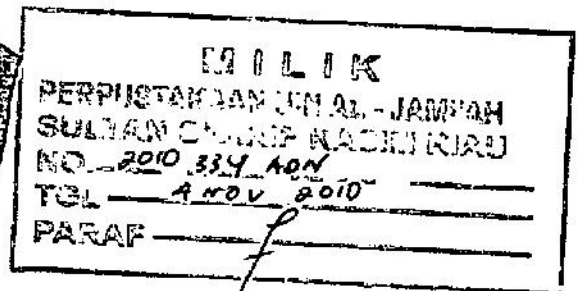


SKRIPSI

FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI ADMINISTRATOR PEMBANGUNAN DI KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Melengkapi Serta Memenuhi
Tugas Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Pada
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



NAMA : MUAMMAR

NIM : 10576002257

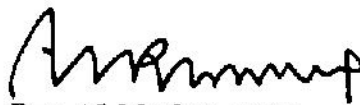
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MUAMMAR
NOMOR MAHASISWA : 10576002257
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI
ADMINISTRATOR PEMBANGUNAN DI
KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING I



Drs. ALMASRI, M.Si
NIP : 1967 0801 200501 1007

PEMBIMBING II



RUSDI, S.Sos, MA
NIP : 150 416 548

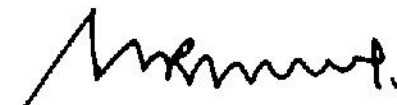
MENGETAHUI

DEKAN



DEKATUN HARAHAP, M.Si
NIP : 1956 0202 1984 031002

KETUA JURUSAN



Drs. ALMASRI, M.Si
NIP : 1967 0801 200501 1007

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUAMMAR
NOMOR MAHASISWA : 10576002257
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI
ADMINISTRATOR PEMBANGUNAN DI
KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR

Hari / Tanggal Ujian : Jum'at 15 Oktober 2010

PANITIA PENGUJI :

KETUA



Drs. H. Kodri H. Nawawi, MA
NIP : 19480414 197803 1 001

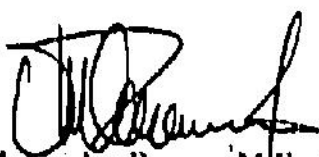
SEKRETARIS



Enri, S.sos, MM
NIP : 19680226 199103 2 002

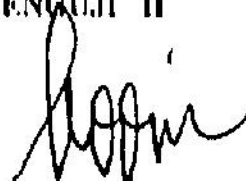
ANGGOTA

PENGUJI I



Mahendra Romus, M.Ec, PhD
NIP : 19711119 200504 1 004

PENGUJI II



Kamaruddin, S.sos, M.Si
NIP : 19790101 200710 1 003

ABSTRAK

Pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan bangsa Indonesia adalah ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengingat masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada di pedesaan maka kelangsungan kegiatan pembangunan diorientasikan kepada pembangunan di pedesaan, sehingga dapat dikatakan keberhasilan pembangunan nasional akan tercermin dari keberhasilan pembangunan di pedesaan.

Derasnya laju pembangunan di desa adalah mencerminkan dari kegiatan, kreatifitas dan daya inisiatif Pemerintah Desa, tepatnya Kepala Desa untuk terlaksananya pembangunan tersebut.

Kepala Desa adalah pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga desa, dan di samping itu ia juga seorang penyelenggara urusan-urusan pemerintah. Oleh karena itu, Kepala Desa merupakan administrator pembangunan. Adapun fungsi kepala desa sebagai administrator pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa
2. Mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam pelaksanaan pembangunan
3. Mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan
4. Mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa
5. Mampu mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa

Berdasarkan pengamatan penulis di Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir Kepala Desa pada tiga desa yang dijadikan sampel, Kepala Desanya kurang mampu melaksanakan fungsinya sebagai administrator pembangunan, karena ada beberapa kegiatan pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan realisasinya atau tidak mencapai target kebutuhan masyarakat.

Hal ini disebabkan karena Masih minimnya tingkat pendidikan kepala desa sehingga kurang mampu mengkoordinir pembangunan yang ada, serta sulitnya menentukan prioritas dalam melaksanakan pembangunan tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan KaruniaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul " Fungsi Kepala Desa sebagai administrator pembangunan di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir ". Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Didalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan baik menyangkut dengan pembahasan materi, nilai ilmiah, maupun redaksinya. Namun demikian, penulis berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf, dan agar pembaca dapat memberikan saran – saran yang bersifat konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Bapak Drs. Azwar Harahap, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Drs. Almasri, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah berkenan menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Bapak Rusdi, S.Sos, MA, selaku Dosen Pembimbing II yang telah berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak – bapak dan Ibu – Ibu Dosen Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak menyumbangkan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
5. Bapak Camat beserta Aparat dan Kepala Desa, yang telah banyak memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini.
6. Rasa hormat penulis sampaikan kepada kedua orang tua (A. Hair, S.Pd dan Nursiah) serta kakak dan adik – adikku tercinta yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis baik pada saat mengikuti perkuliahan hingga pada sampai penulisan skripsi ini.
7. Spesial buat Adindaku Yeni Herlina yang telah banyak membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini, dan penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada beliau atas support dan Do'anya.
8. Rasa hormat juga penulis sampaikan kepada Ibu Kos (Dra. Hj. Masittah) dan teman – teman satu kos Kutilang Ujung No. 07 yang telah membantu dan memberikan support selama proses penelitian dan penulisan skripsi.
9. Rekan – rekan seperjuangan di ANA '05, Arul, Mike, Kojek, PW, Travel, and Agun.
10. Selanjutnya buat rekan – rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai penutup penulis hanya dapat mendo'akan kepada pihak – pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, semoga Allah SWT semesta melimpahkan Rahmt dan KaruniaNya kepada kita semua, AMIN.

Pekanbaru, Januari 2010

Penulis

MUAMMAR
10576002257

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang Masalah	1
I.2. Perumusan Masalah	12
I.3. Tujuan Penelitian	12
I.4. Kegunaan Penelitian	13
I.5. Sistematika Penulisan	13
BAB II KONSEP TEORITIS	
II.1. Pembangunan Desa	15
II.2. Pengertian Kepemimpinan	16
II.3. Hipotesis	21
II.4. Konsep Operasional	22
BAB III METODE PENELITIAN	
III.1. Lokasi Penelitian	28
III.2. Jenis dan Sumber Data	28
III.3. Populasi dan Sampel	28
1. Populasi	28
2. Sampel	29
III.4. Teknik Pengumpulan Data	31
III.5. Analisa Data	31
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
IV.1. Keadaan Umum Kecamatan Reteh	32
1. Keadaan Geografis	32

2. Keadaan Penduduk	34
3. Mata Pencuharian	36
4. Kehidupan Keagamaan	37
5. Pendidikan	39
6. Struktur Pemerintahan	41
7. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	43

BAB V ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN

V.1. Identitas Responden.....	46
V.2. Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Kecamatan Retch Kabupaten Indragiri Hilir.....	47
V.2. Hambatan – Hambatan Dalam Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Kecamatan Retch Kabupaten Indragiri Hilir	47

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

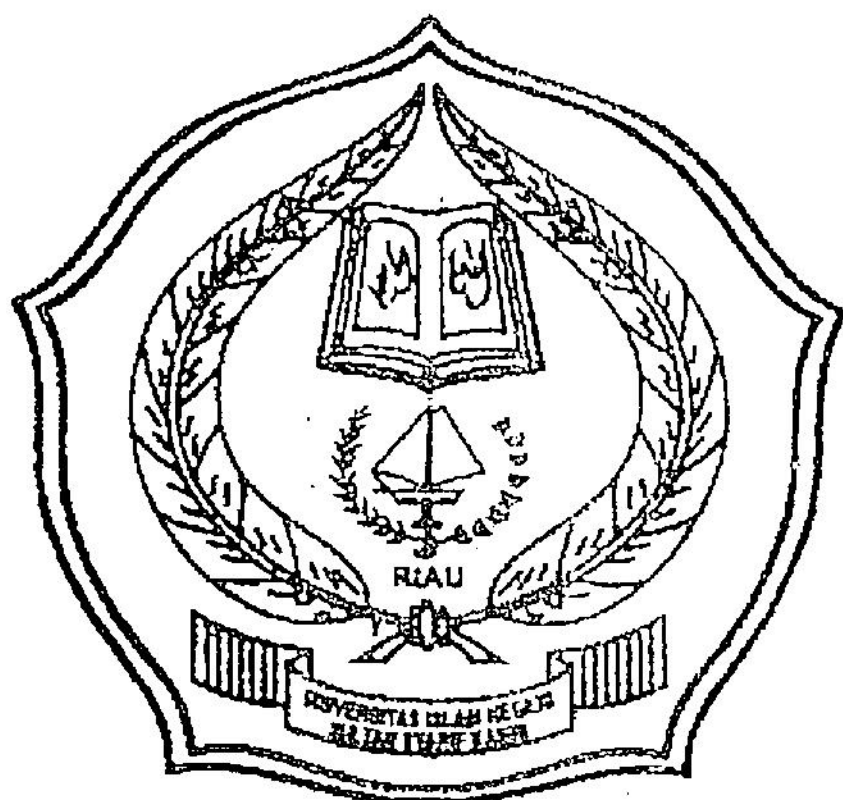
VI.1. Kesimpulan	63
VI.2. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL.

Tabel I.1 Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Kecamatan Reth.....	7
Tabel I.2 Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Kecamatan Reth.....	8
Tabel I.3 Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Kecamatan Reth.....	9
Tabel I.4 Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa.....	10
Tabel I.5 Daftar Identitas Kepala Desa Dan Penduduk Desa Di Kec.Reth.....	11
Tabel II.1 Jumlah Populasi dan Sampel.....	30
Tabel II.2 Pembagian Daerah/wilayah Kec. Reth Kab. Indragiri Hilir.....	33
Tabel II.3 Jumlah Populasi Penduduk Tiap Desa	35
Tabel II.4 Jumlah Penduduk Dirinci Berdasarkan Jenis Kelamin	36
Tabel II.5 Jumlah Pemeluk Agama Di Kecamatan Reth	38
Tabel II.6 Jumlah Sarana Ibadah Di Kecamatan Reth	39
Tabel II.7 Jumlah Sarana Pendidikan Di Kecamatan Reth	40
Tabel III.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	46
Tabel III.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	47
Tabel III.3 Tanggapan Responden Terhadap Kemampuan Kepala Desa Membunt Perencanaan Pembangunan Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat Desa	49
Tabel III.4 Tanggapan Responden Terhadap Kemampuan Kepala Desa Memberikan Pengaruh Kepada Dawuhan Dalam Pelaksanaan Pembangunan.....	51
Tabel III.5 Tanggapan Responden Terhadap Kemampuan Kepala Desa Mengambil Keputusan Dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan.....	53

Tabel. III.6 Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Mengkoordinir Penyelenggaraan Tugas Pembangunan.....	55
Tabel. III.7 Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Mengawasi -Aktivitas – Aktivitas Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	56
Tabel. III.8 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rakyat Indonesia telah berkembang, dilihat dari segi ketatanegaraan, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Telah terdapat lembaga-lembaga pemerintah yang pada dasarnya ada tiga tingkat, pertama nasional (Raja), kedua tingkat Kabupaten (Bupati) dan ketiga tingkat Desa (Kepala Desa). Hidup bersama melahirkan tata hidup yang berkembang menjadi adat, yang ditaati tanpa syarat oleh segenap anggota masyarakat. Adat adalah tidak lain dari hukum yang tidak tertulis, turun temurun sejak adanya nenek moyang, hukuman bagi yang melanggar berupa sikap tindakan dari keseluruhan golongan. Oleh karena itu masyarakatnya disebut masyarakat hukum. Dengan demikian maka tiap daerah mempunyai adat istiadatnya masing-masing, mengatur dan mengurus hidup bersama. Istilah "mengatur" berarti bahwa ada orangnya yang mengatur, yang dapat terdiri dari satu atau lebih orang atau suatu lembaga. Istilah lain dari mengatur ialah "memerintah" maka lembaganya disebut pemerintah.

Ada tiga unsur pokok pada pemerintahan desa, pertama Kepala Desa, kedua Pamong Desa dan ketiga Aparat Desa. Kepala Desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa. Bersama-sama dengan pembantunya ia merupakan Pamong Desa. Kepala Desa adalah pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga desa, dan di samping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah. Meskipun demikian di

dalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri. Dalam membuat peraturan desa, kepala desa harus meminta pendapat masyarakat dalam rapat desa, khususnya mengenai rusan yang menyangkut Desa, urusan yang sangat penting, Kepala Desa wajib berunding dengan rakyat yang berhak memilih Kepala Desa dan orang yang dipandang sesepuh dan menurut adat dipandang terkemuka.

Oleh karena itu, Kepala Desa merupakan administrator pembangunan, ia mengadakan koordinasi dan kontrol atas segala kegiatan pembangunan di desa, terutama yang dilaksanakan oleh, untuk dan dari desa, yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga desa.

Derasnya laju pembangunan di desa adalah mencerminkan dari kegiatan, kreatifitas dan daya inisiatif Pemerintah Desa, tepatnya Kepala Desa untuk terlaksananya pembangunan tersebut.

Pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan bangsa Indonesia adalah ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengingat masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada di pedesaan maka kelangkaan kegiatan pembangunan diorientasikan kepada pembangunan di pedesaan, sehingga dapat dikatakan keberhasilan pembangunan nasional akan tercermin dari keberhasilan pembangunan di pedesaan.

Kehidupan masyarakat di pedesaan cenderung makin maju dan makin berkembang. Hal tersebut bukan saja dapat dilihat dari jumlah penduduknya yang makin besar, tetapi dapat juga dilihat dari aktifitasnya yang juga semakin luas dan

semakin kompleks. Sejalan dengan itu, kebutuhan dan kepentingan masyarakat desapun makin besar dan makin kompleks pula. Kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa tersebut, bukan saja berkaitan dengan berbagai faktor yang bersifat fisik seperti kebutuhan pangan, papan dan sandang, tetapi juga berkaitan dengan faktor-faktor yang bersifat non fisik seperti pendidikan, keagamaan, mobilitas sosial, keamanan dan sebagainya.

Agar pembangunan di pedesaan dapat terlaksana dan berjalan lancar, diperlukan adanya suatu pemerintah yang mampu melaksanakan program pembangunan pada tingkat yang terendah yakni desa / kelurahan sesuai dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 tersebut, pemerintah desa merupakan pemerintahan tingkat terendah yang langsung bertanggung jawab kepada camat, yang mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan, pembangunan maupun tugas-tugas kemasyarakatan.

Sedangkan tugas dan kewajiban kepala desa sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 adalah :

- 1) memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
- 2) memelihara kehidupan masyarakat desa
- 3) memelihara perekonomian desa
- 4) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- 5) mendamaikan perselisihan masyarakat di desa

6) mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Pembangunan desa merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan merupakan potensi yang sangat besar untuk menunjang pembangunan nasional, karena keberhasilan pembangunan desa merupakan dasar tercapainya pembangunan nasional.

Pengertian dari pembangunan yaitu merupakan suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan atau perubahan yang dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dan pembangunan dalam rangka pembinaan bangsa. (S.P. Siagian, 1979 : 12)

Dari pendapat diatas, jelaslah bahwa pembangunan yang dilaksanakan tersebut dapat diartikan sebagai salah satu usaha perubahan ke arah pembaharuan menuju terciptanya kehidupan yang layak dan lebih baik yakni mensejahterakan kehidupan bangsa secara adil dan merata.

Pembangunan yang sekarang dilaksanakan memang ditujukan kearah pedesaan, hal ini berkaitan dengan alasan bahwa daerah pedesaan merupakan ujung tombak bagi pelayanan terhadap masyarakat dalam penyampaian aspirasi.

Menurut Tallzudulu Ndraha (1990 : 17), pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa sebagai usaha dan bagian pembangunan yang dilaksanakan pada unit pemerintah terendah.

Karakteristik Negara Indonesia adalah bahwa penduduk Indonesia kebanyakan tinggal di daerah pedesaan. Oleh karena itu, "masalah pembangunan dan pembinaan desa menjadi pusat perhatian pemerintah karena daerah pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Hal ini dimengerti karena lebih dari 70% penduduk Indonesia tersebar di desa-desa". **Talizuduhu Ndraha (1990 : 1).**

Untuk tercapainya tujuan pembangunan desa yang merupakan bagian pembangunan yang penting artinya, maka pelaksanaan dan pertanggung jawaban diserahkan kepada kepala desa sebagai koordinator dan administrator pembangunan desa.

Dalam melakukan segala usaha guna tercapainya tujuan tersebut, kepala desa haruslah mendapat dukungan dan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kepala desa sebagai pimpinan dibidang pemerintahan haruslah juga berpengaruh terhadap unsur dibidang lainnya, misalnya dibidang kemasyarakatan dan keagamaan.

Dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan adanya perencanaan, penggerakan, bimbingan serta pengawasan dalam pelaksanaan kerja tanpa adanya hal ini semuanya tidak akan dapat berlangsung dan terlaksana dengan baik untuk itu perlu adanya seseorang pimpinan yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan hal tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas sebagai konsekuensi lebih lanjut dari perkembangan sosial kemasyarakatan di daerah pedesaan, maka kegiatan pemerintah ditingkat desa juga makin luas dan makin kompleks. Untuk mendukung perkembangan tersebut, sudah tentu sangat diperlukan seorang pemimpin yaitu kepala desa sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam wilayah desanya karena kepala desa itu sendiri adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pelaksanaan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dengan demikian jelaslah bahwa kepemimpinan kepala desa adalah merupakan administrator dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh **Talizuduhu Ndruha (1990 : 25)** bahwa Fungsi kepala desa sebagai administrator pembangunan adalah :

1. Mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa
2. Mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam pelaksanaan pembangunan
3. Mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan
4. Mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa
5. Mampu mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada uraian terdahulu bahwa Kepala Desa sebagai administrator pembangunan di desa atau sebagai perencana pembangunan hendaklah mampu melaksanakan pembangunan tersebut sesuai dengan

kebutuhan masyarakat dan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa yang dipimpinnya.

Di Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir terutama pada 3 (tiga) desa sampel, Kepala Desanya kurang dapat melaksanakan fungsinya sebagai administrator pembangunan di desa yang dipimpinnya. Hal ini dapat diketahui dari gejala-gejala yang ditemukan di lokasi penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembangunan di desa target yang ingin dicapai tidak sesuai dengan realisasinya
2. Masih adanya tingkat pendidikan Kepala Desa yang rendah

Selanjutnya untuk mengetahui daftar usulan kegiatan pembangunan masing-masing desa di Kecamatan Reth berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 3 desa dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.1: Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Kecamatan Reth

Desa Seberang Sanglar

No	Kegiatan Pembangunan	Dana	Lokasi	Volume
1	Rehab Sekolah	APBD	-SDN. 006 -SDN. 029 -SDN. 035	3 Runggan 3 Runggan 3 Runggan
2	Deruaga	APBD	Ibu Desa	4 x 35 M
3	Trfo Tata Air Pertanian	APBD	Pasar Lamm	3000 M
4	Trfo Tata Air Perkebunan	APBD	Sumber Hayat	3000 M
5	Meubler Kantor	APBD	Kantor Desa	- 5 Unit Meja - 5 Unit Kursi - 3 Unit Lemari
6	Cor Boton	APBD	Ibu Desa	2 x 1000 M

Sumber : Kantor Kecamatan Reth Indragiri Hilir, 2009

Dari tabel 1.1, diatas terlihat bahwa pada tahun 2009 – 2010 Desa Seberang Sunglar menyusun suatu usulan kegiatan atau perencanaan yaitu : Pertama, rehab sekolah yang dilakukan pada 3 SD Negeri sekaligus dengan volume 3 ruangan pada tiap – tiap sekolah masing – masing. Kedua, pembuatan dermaga/pelabuhan dengan volume 4 x 35 M. Ketiga, trio tata air pertanian dengan volume 3000 M. Keempat, trio tata air perkebunan dengan volume 3000 M. Kelima, Meubiler Kantor dengan volume 5 unit meja, 5 unit kursi, dan 3 unit lemari. Keenam, cor beton dengan volume 2 x 1000 M.

Tabel 1.2: Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Kecamatan Reteh

Desa Seberang Pulau Kijang

No	Kegiatan Pembangunan	Dana	Lokasi	Volume
1	Pembangunan Badan Jalan	PM	Dusun Mekar jayn ke- Desa Seberang Pulau Kijang	4 x 4500 M
2	Pembangunan Dermaga Miring	PM	Dusun Parit juwa Seberang Pulau kijang	4 x 50 M
3	Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Kesehatan	PM	Dusun Sungai Payung	1 Unit

Sumber : Kantor Kecamatan Reteh Indragiri Hilir, 2009

Dari tabel 1.2, diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2009 – 2010 Desa Seberang Pulau Kijang menyusun suatu usulan kegiatan atau perencanaan yaitu : Pertama, pembangunan badan jalan dengan volume 4 x 4500 M. Kedua, pembangunan

dermaga miring dengan volume 4 x 50 M. Ketiga, pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Kesehatan dengan volume 1 unit.

Tabel 1.3: Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Kecamatan Reteh

Desa Sungai Undan

No	Kegiatan Pembangunan	Dana	Lokasi	Volume
1	Pembangunan Rumah Layak Huni		Ibu Desa	25 Unit
2	Tanggul		Seberang Sungai Undan	7000 M
3	Semenisasi Jalan / cor beton		Sungai Undan Ke- Pulau Kijang	1.5 x 1000 M

Sumber : Kantor Kecamatan Reteh Indragiri Hilir, 2009

Dari tabel 1.3, diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2009 – 2010 Desa Sungai Undan menyusun suatu usulan kegiatan atau perencanaan yaitu : Pertama, pembangunan rumah layak huni dengan volume 25 unit. Kedua, pembuatan tanggul dengan volume 7000 M. Ketiga, semenisasi jalan/cor beton dengan volume 1.5 x 1000 M.

Kecamatan Reteh sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten INTH, berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada 3 desa yang ada pada tabel diatas ternyata masih terdapat pelaksanaan pembangunan yang tidak mencapai target atau tidak sesuai dengan realisasinya. Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian pada 3 desa tersebut sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4: Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa

Tahun	Desa	Pelaksanaan pembangunan	Target	Realisasi
2009-2010	Seb. Sanglar	- Cor Beton - Rehab Sekolah	$\pm 2 \times 1000 \text{ M}$ - SDN. 006 3 Ruangan - SDN. 035 3 Ruangan	$\pm 2 \times 150 \text{ M}$ - 2 Ruangan - 1 Ruangan Dan 1 Toilet
2009-2010	Seb. P. Kijang	Pembangunan Badan Jalan	$\pm 4 \times 4500 \text{ M}$	$\pm 3.5 \times 1200 \text{ M}$
2009-2010	Sei. Undan	Pembangunan Rumah Layak Huni	25 Unit	7 Unit

Sumber : Kantor Kecamatan Reth Indragiri Hilir, 2009

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa pada tahun 2009-2010 disusun suatu perencanaan dan pelaksanaan proyek/kegiatan pembangunan yaitu pada desa Seberang Sanglar direncanakan melakukan cor beton dan rehab sekolah, pada desa Seberang Pulau Kijang direncanakan Pembangunan Badan Jalan, dan pada desa Sei. Undan direncanakan pembangunan rumah layak huni. Namun pada kenyataannya kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan tersebut tidak ada yang dilaksanakan sepenuhnya, untuk cor beton target yang akan dilaksanakan adalah $\pm 2 \times 1000 \text{ M}$ terrealisasi hanya $\pm 2 \times 150 \text{ M}$, kemudian rehab sekolah target untuk SDN.

006, 3 ruangan terealisasi hanya 2 ruangan sedangkan SDN. 035 target 3 ruangan terealisasi hanya 1 ruangan dan 1 Toilet, Untuk pembangunan badan jalan seharusnya dilaksanakan $\pm 4 \times 4500$ M namun terealisasi hanya $\pm 3.5 \times 1200$ M, begitu juga dengan pembangunan rumah layak huni target 25 unit realisasinya hanya 7 unit saja. Tidak berjalan dengan lancarnya pelaksanaan pembangunan desa ini dikarenakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa tersebut kurang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Mengenai jumlah penduduk desa di Kecamatan Retch kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.5: Daftar Identitas Kepala Desa Dan Penduduk Desa Di Kec.Retch

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Pendidikan
1	Pulau Kijang	17.683	SMA
2	Pulau Kecil	5.462	SMP
3	Sanglar	5.872	SI
4	Seb. Sanglar	4.163	SMP
5	Mekar Sari	1.764	SMP
6	Seb. P. Kijang	1.233	SMA
7	Pulau Ruku	1.451	SMP
8	Sungai Temb	2.649	SMA
9	Sungai Asam	1.504	SI
10	Sungai Undan	2.652	DI3

Sumber : Kantor Kecamatan Retch Indragiri Hilir, 2009

Berdasarkan tabel 1.5. diatas dapat diketahui jumlah penduduk dan tingkat pendidikan Kepala Desa di Kecamatan Reth Indragiri Hilir yakni yang paling banyak adalah Kepala Desa yang memiliki tingkat pendidikan Tamat SMP ada 4 Desa, Tamat SMA ada 3 Desa, Tamat D3 ada 1 Desa, dan Tamat S1 ada 2 Desa. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Kepala Desa di Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir masih sangat minim. Oleh karena itulah fungsi kepala desa sebagai administrator tidak berjalan dengan baik, karena kepala desa kurang mampu mengkoordinir pembangunan yang ada serta sulitnya menentukan prioritas dalam melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul “Fungsi Kepala Desa sebagai administrator pembangunan di Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir”.

1.2. Perumusan Masalah

Dari gejala-gejala diatas penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut : “Bagaimana Fungsi Kepala Desa sebagai administrator pembangunan di Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir”.

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui fungsi Kepala Desa sebagai administrator pembangunan di Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir

- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi Kepala Desa sebagai administrator pembangunan di Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir

1.4. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi bagi aparat desa di Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir, terutama dalam hal pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
- b. Sebagai aplikasi dari teori perkuliahan yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan dan kebijakan pemerintah
- c. Sebagai studi banding bagi penelitian selanjutnya

1.5. Sistematika Penulisan

- BAB I** : Bab ini disebut pendahuluan. Didalamnya berisi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan, tinjauan pustaka, definisi konseptual, dan metode penelitian.
- BAB II** : Dalam bab ini penulis membahas tentang deskripsi teori, kerangka berfikir, hipotesis, konsep operasional,
- BAB III** : Dalam bab ini penulis akan membahas tentang metode penelitian.
- BAB IV** : Bab ini merupakan gambaran umum tentang kondisi geografis Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir.

- BAB V** : Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pembahasan hasil penelitian.
- BAB VI** : Dalam bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB II

KONSEP TEORITIS

II.1. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah usaha pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintahan terendah yang harus dilaksanakan dan dibina secara terus menerus, sistematis dan terarah sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan negara yang menyeluruh (**Depdagri Dirjend Bangdes, 1981 : 12**).

Pembangunan desa terpadu berwawasan lingkungan yang pada dasarnya mencakup proses perencanaan dan pengelolaan baik komponen fisik maupun non fisik desa. Pembangunan desa terpadu berwawasan lingkungan dapat dikatakan berhasil apabila:

- a) Tercapainya peningkatan mutu kehidupan setiap warga masyarakat, antara lain mencakup mutu lingkungan fisik, pola konsumsi dan pemenuhan konsumsi fisik dan rasa aman dari gangguan-gangguan.
- b) Tercapainya peningkatan secara terus menerus kebutuhan untuk memperoleh nafkah, mata pencaharian, sehingga apabila pengangguran meningkat menunjukkan indikasi menurunnya mutu kehidupan fisik manusia.
- c) Meningkatkan kemampuan penduduk untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan kehidupannya.
- d) Pembangunan yang dilaksanakan mampu meningkatkan kesadaran penduduk akan pentingnya pemeliharaan lingkungan disamping mampu berdaya sendiri

untuk meningkatkan keterampilannya. Berkembangnya solidaritas sosial anggota-anggota masyarakat juga merupakan suatu ukuran keberhasilan pembangunan yang berorientasi serta berwawasan lingkungan. (1 Nyoman Bratha, 1991 : 66)

Menurut S.P. Slaglan (1985 : 91) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintahan dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan desa menurut Taliziduhu Ndraha (1990 : 1) merupakan suatu proses dengan mana usaha-usaha pemerintahan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat kedalam kehidupan bangsa dan memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada kemajuan nasional.

Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah bahwa desa adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di bawah Kabupaten.

11.2. Pengertian Kepemimpinan

Menurut Susilo Maryoto (1997 : 158) bahwa : kepemimpinan adalah keseluruhan aktifitas dalam rangka mempengaruhi orang-orang agar mau bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang berarti membimbing atau tuntun. Kata kerjanya adalah memimpin yang artinya membimbing atau menuntun dan kata bendanya adalah pemimpin yaitu orang yang membimbing atau menuntun.

Menurut **Kartini Kartono (2008 : 31)** bahwa kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai dari interaksi otomatis diantara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin (ada relasi inter personal). Kepemimpinan ini bisa berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang lain guna melakukan sesuatu, demi mencapai suatu tujuan tertentu.

Selanjutnya **Schneider, Donaghy dan Neoman (Onong Uchjana Effendi, 1992 : 1)** menegaskan bahwa kepemimpinan adalah mengacu kepada perilaku yang ditunjukkan seseorang atau lebih individu dalam kelompok mencapai tujuannya.

Berdasarkan beberapa batasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kepemimpinan itu adalah suatu kepemimpinan atau kegiatan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan, dengan kata lain kepemimpinan adalah perpaduan dari faktor pemimpin, pengikut dan situasi.

Menurut **Arlita Abdul Rahman (1991 : 26)** bahwa orang lain itu mau dipengaruhi dan digerakkan disebabkan karena :

1. Adanya dorongan untuk mengikuti pimpinan sehingga *weerstand* dan resistensi dan orang-orang untuk mengikuti pimpinan dengan mudah dapat melewatinya.

2. Adanya sifat khusus dari pimpinan ialah sifat-sifat kepemimpinan yang mempengaruhi jiwa orang-orang sehingga kagum dan tertarik pada pimpinan itu.
3. Adanya kemampuan pada pimpinan untuk menggunakan teknik kepemimpinan.

Dari pernyataan diatas jelaslah dikatakan bahwa untuk berhasilnya didalam menjalankan kepemimpinan, berarti bahwa seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberikan keyakinan kepada yang dipimpinnya, yang dipimpin harus merasakan kemanfaatan dari kepemimpinan akan efektif, dan yang dipimpin dapat menerimanya dengan taat dan ikhlas.

Selanjutnya **Kartini Kartono (2008 : 93)** fungsi kepemimpinan ialah memandu, menuntun, membimbing, membangun memberi atau membangunkan motivasi-motivasi kerja , mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik, memberikan supervisi atau pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan.

Menurut **Ghuandjar Kartasasmita (1996 : 41)** seorang pemimpin harus memiliki tiga sifat, yaitu :

Pertama, ia harus memiliki idealisme, artinya jelas komunn dan kearah mana ia ingin membawa yang dipimpinnya, kar

Kedua, ia harus memiliki pengetahuan, untuk dapat secara efektif membawa yang dipimpin kearah tujuan yang "dikatakannya". Ia harus mengetahui cara memimpin dan mengunakan bidang atau tugas dari kelompok yang dipimpinnya, bukan

hanya mengerti teknik kepemimpinan, tetapi juga menguasai bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

Ketiga, seorang pemimpin harus menjadi teladan dan sumber inspirasi. Oleh karena itu, seorang pemimpin diharapkan manusia yang beriman dan bertakwa, karena diatas iman dan takwa, pelaksanaan dari rencana kerja dapat diselenggarakan dengan baik.

Selain sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin, maka hal yang lain yang penting untuk menjalankan kepemimpinannya adalah faktor kemampuan pemimpin karena bagaimanapun baiknya sifat pemimpin, tetapi juga kemampuan yang ada pada dirinya kurang, maka sulit akan berhasil dalam menjalankan kepemimpinannya. Menurut **WA. Gerungan (Onong U. Effendi, 1992 : 22)** menyebutkan kemampuan yang harus dimiliki seorang pemimpin meliputi :

1. Penglihatan sosial yaitu : kemampuannya dalam melihat dan memahami perasaan, sikap dan kebutuhan anggota lain dalam suatu kelompok
2. Kemampuan berpikir abstrak yaitu mempunyai kecerdasan yang tinggi
3. Keseimbangan sosial yaitu : pada diri seorang pemimpin harus dapat suatu kematangan emosional yang berdasarkan kesadaran yang mendalam akan membutuhkan keteguhan, etika-etika dan dalam perasaan serta pengintegrasian, yang semuanya itu dalam suatu kepribadian yang harmonis.

Menurut **M. Karyadi (1983 : 72)** fungsi kepemimpinan adalah :

1. Fungsi perencanaan
2. Fungsi pengembangan realitas
3. Fungsi pengawasan
4. Fungsi pengambilan keputusan
5. Fungsi pemberian anugerah

Sedangkan menurut **A.W. Wijaya (2001 : 14)** : "kepemimpinannya berperan sebagai penggerak segala sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang ada dalam organisasi ; keberhasilan organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan akan sangat bergantung kepada berperannya pemimpin".

Lebih lanjut **S. Pamudji (1989 : 65)** menekankan bahwa untuk dapat menelaah dan mempelajari mengenai kepemimpinan haruslah bertitik tolak pada 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Pemimpin, yaitu seseorang yang menjalankan fungsi kepemimpinan (leadership)
2. Pengikut, yaitu sekelompok orang yang berkedudukan untuk mengikuti atau berfungsi kepengikutan atau yang biasa disebut followership
3. Situasi dan kondisi, yaitu kondisi yang melingkupi dan mengelilingi kepemimpinan atau kepengikutan tersebut.

Maka mengenai kepada pendapat diatas, jelaslah bahwa tugas seorang pemimpin sangat berat, karena ia harus dapat menggerakkan orang lain dan memalukan perannya agar ia benar-benar mendapat tempat di tengah-tengah para

pengikutnya. Karena itu seorang pemimpin yang menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya harus dapat mensekresikan ketiga unsur-unsur diatas.

Menurut **Talizuduhu Ndraha (1990 : 25)** bahwa fungsi kepala desa sebagai administrator adalah :

1. Mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam pelaksanaan pembangunan
3. Mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan
4. Mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa
5. Mampu mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa

11.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan relevan, belum didasarkan fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum merupakan jawaban yang empiris. (Sugiyono, 2006 : 70)

Berdasarkan pada uraian yang telah penulis sajikan, selanjutnya dapat dikemukakan hipotesis penelitian yaitu : Diduga tidak terealisasinya Pelaksanaan pembangunan di desa sesuai dengan target karena **Masih minimnya tingkat pendidikan kepala desa sehingga kurang mampu mengkoordinir pembangunan yang ada, serta sulitnya menentukan prioritas dalam melaksanakan pembangunan tersebut.**

II.4. Konsep Operasional

Untuk menghindari kekeliruan pemahaman, beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini akan dioperasionalkan lebih lanjut. Secara operasional, konsep-konsep tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah orang atau penduduk yang mempunyai kewenangan dan tugas pembantuan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten
- 2) Kepala Desa adalah kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa yang ada di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir
- 3) Fungsi Kepala Desa adalah tugas-tugas yang harus dijalankan oleh kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir
- 4) Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di desa Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir

5) Fungsi Kepala Desa sebagai administrator pembangunan Talizuduhu Ndraha (2004 : 36) adalah dilihat dari :

1. Mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa
2. Mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam pelaksanaan pembangunan
3. Mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan
4. Mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa
5. Mampu mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa

Untuk memudahkan penulisan dan menganalisa permasalahan maka digunakan pengukuran :

1. Fungsi kepala desa sebagai administrator pembangunan :

Adalah tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang berbeda di wilayahnya, yang diukur dari :

a. Mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa.

Yaitu Kepala Desa memiliki kemampuan dalam membuat perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meliputi kegiatan pembangunan, pendidikan, sosial, budaya, dan ketertiban umum.

Pengukurannya :

Mampu : Apabila Kepala Desa memiliki kemampuan dalam membuat perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

yang meliputi kegiatan pembangunan, pendidikan, sosial, budaya dan ketertiban umum.

Cukup mampu : Apabila Kepala Desa membuat perencanaan hanya meliputi bidang pendidikan, sosial dan budaya saja.

Kurang mampu : Apabila Kepala Desa kurang memiliki kemampuan dalam membuat perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik kegiatan pembangunan, pendidikan, sosial, budaya, dan ketertiban umum.

b. Mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam pelaksanaan pembangunan.

Yaitu Kepala Desa memiliki kemampuan pengarahan kepada aparat desa maupun masyarakat tentang arti pentingnya pelaksanaan pembangunan di desa dan manfaatnya bagi masyarakat desa.

Pengukurannya :

Mampu : Apabila Kepala Desa memiliki kemampuan memberikan pengurulan kepada aparat desa maupun masyarakat tentang arti pentingnya pelaksanaan pembangunan di desa dan manfaatnya bagi masyarakat desa

Cukup mampu : Apabila Kepala Desa memberikan pengarahan hanya menjelaskan mengenai arti pentingnya pelaksanaan pembangunan desa kepada aparat desa maupun masyarakat (tidak menjelaskan manfaat dari pembangunan desa)

Kurang mampu : Apabila Kepala Desa kurang mampu memberikan pengaruh kepada aparat desa maupun masyarakat tentang arti pentingnya pelaksanaan pembangunan di desa dan manfaatnya bagi masyarakat desa

c. Mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan.

Yaitu Kepala Desa memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa, melakukan musyawarah dengan aparat desa, pemuka masyarakat, dan masyarakat desa.

Pengukurannya :

Mampu : Apabila Kepala Desa memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa, melakukan musyawarah dengan aparat desa, pemuka masyarakat, dan masyarakat desa

Cukup mampu : Apabila Kepala Desa mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa hanya melakukan musyawarah dengan aparat desa dan pemuka masyarakat saja

Kurang mampu : Apabila Kepala Desa kurang memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa, melakukan musyawarah dengan aparat desa, pemuka masyarakat, dan masyarakat desa

d. Mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa

Yaitu Kepala Desa memiliki kemampuan dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan program pembangunan, dengan melakukan pembagian tugas terhadap pihak-pihak yang terkait (aparat desa, pemuka masyarakat desa, dan masyarakat desa) dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Pengukurannya :

Mampu : Apabila Kepala Desa memiliki kemampuan dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan program pembangunan, dengan melakukan pembagian tugas terhadap pihak-pihak yang terkait (aparat desa, pemuka masyarakat desa, dan masyarakat desa) dalam pelaksanaan pembangunan tersebut

Cukup mampu : Apabila Kepala Desa memiliki kemampuan dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan program pembangunan, hanya melakukan pembagian tugas terhadap aparat desa dan pemuka masyarakat saja

Kurang mampu : Apabila Kepala Desa kurang memiliki kemampuan dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan program pembangunan, dengan melakukan pembagian tugas terhadap pihak-pihak yang terkait (aparat desa,

pemuka masyarakat desa, dan masyarakat desa) dalam pelaksanaan pembangunan tersebut

e. Mampu mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Yaitu Kepala Desa memiliki kemampuan mengawasi aktivitas dalam proses pelaksanaan pembangunan, yang dilakukan dengan mengawasi langsung kegiatan pelaksanaan pembangunan yang diadakan (1 bulan sekali).

Pengukurannya :

Mampu : Apabila Kepala Desa memiliki kemampuan mengawasi aktivitas dalam proses pelaksanaan pembangunan, yang dilakukan dengan mengawasi langsung kegiatan pelaksanaan pembangunan yang diadakan (1 bulan sekali)

Cukup mampu : Apabila Kepala Desa mengawasi aktivitas dalam proses pelaksanaan pembangunan, yang dilakukan dengan mengawasi langsung kegiatan pelaksanaan pembangunan yang diadakan (2 bulan sekali)

Kurang mampu : Apabila aktivitas dalam proses pelaksanaan pembangunan, yang dilakukan dengan mengawasi langsung kegiatan pelaksanaan pembangunan yang diadakan (3 bulan sekali)



BAB III

METODE PENELITIAN

III.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 3 desa di Kecamatan Retch Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan ketiga desa tersebut Kepala Desanya memiliki tingkat pendidikan yang berbeda.

III.2. Jenis dan Sumber Data

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. Data tersebut adalah data tentang pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Retch Kabupaten Indragiri hilir.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua yang sifatnya mendukung dalam penelitian. Data ini diperoleh dari Kantor Camat Retch dan Kantor Kepala Desa.

III.3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat desa berdasarkan Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.609 yakni mengambil tiga Desa di Kecamatan Retch Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

- 1. Seb. Sanglar
- 2. Seb. Pulau Kijang
- 3. Sei. Undan

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Adapun sampel yang diambil untuk masyarakat desa yang lumayan banyak penulis menggunakan teknik *sampling insidental* yakni penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti. Bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. Untuk masyarakat desa penulis mengambil sampel dengan menggunakan rumus slovin, dimana penetapan sampel mempertimbangkan batas ketelitian yang dapat mempengaruhi kesalahan pengambilan sampel populasi. Rumus slovin tersebut adalah :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

- n : Ukuran sampel
- N : ukuran populasi
- e : Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan

Adapun jumlah populasi dari penelitian ini adalah 1.609 orang maka dengan besarnya jumlah tersebut demi menghemat biaya, tenaga, dan waktu maka penulis mengambil sampel dengan tatal kesalahan 10%. Dari populasi yang berjumlah 1.609 orang didapat sampel sebanyak

$$n = \frac{1609}{1 + 1609 \times (10)^{-2}}$$

$$n = \frac{1609}{1 + 1609 \times (0.1\%)^{-2}}$$

$$n = \frac{1609}{1 + 1609 \times (0.01\%)^{-2}}$$

$$n = \frac{1609}{17.09}$$

$$n = 94.14$$

Jadi dapat dikatakan bahwa jumlah sampel dari populasi 1.609 orang adalah sebanyak 94 orang. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah sampel dari tiap – tiap desa adalah dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel II.1: Jumlah Populasi dan Sampel

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel/ Responden	Tarif kesalahan (%)
1	Masyarakat Desa			
	berdasarkan jumlah KK :			
	- Desa Seb. Sanglar	833	49	10
	- Desa Seb. Pulau Kijang	246	14	10
	- Desa Sungai Undan	530	31	10
	Jumlah	1.609	94	10

Sumber data : Kantor Kecamatan Retch Indragiri Hilir, 2009

III.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara / metode, yaitu :

1) Wawancara (interview)

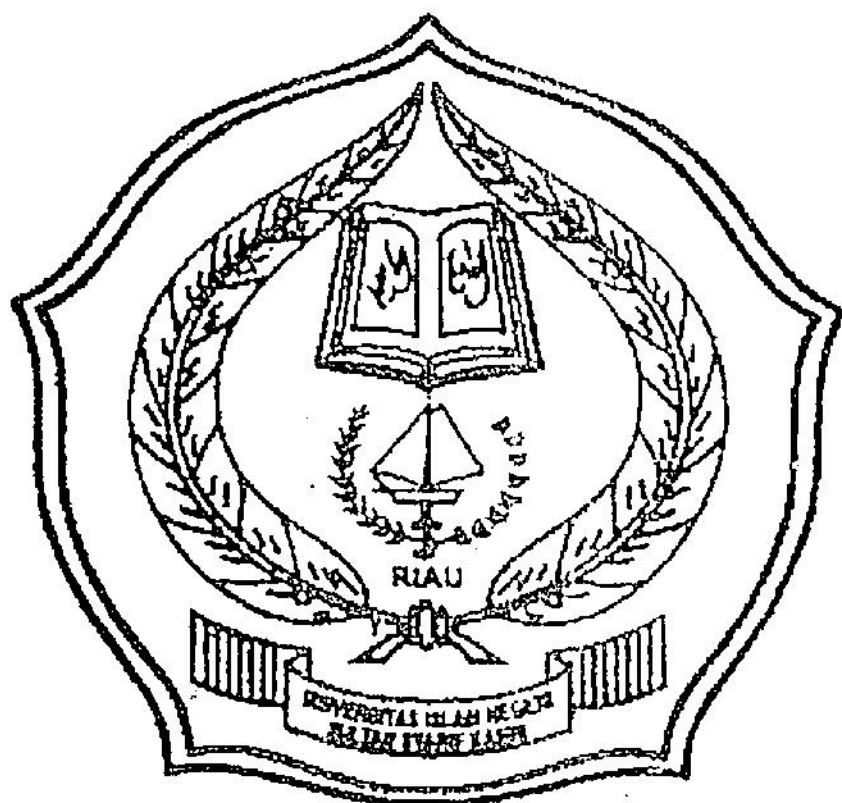
Yaitu dengan mengadakan tanya jawab dengan responden untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2) Angket (questioner)

Yaitu dengan menyusun daftar pertanyaan alternatif jawaban yang kemudian diedarkan kepada responden untuk diisi.

III.5. Analisis Data

Setelah data dan semua bahan-bahan yang dibutuhkan terkumpulkan, penulis memisahkan dan mengelompokkan data tersebut menurut jenisnya dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase. Dalam penelitian ini data dianalisa secara deskriptif yaitu data yang diperoleh disusun berdasarkan pada tabel yang telah disesuaikan dengan daftar pertanyaan yang ada hubungannya dengan penelitian sehingga dapat diteliti berdasarkan pada teori – teori yang telah diperoleh dari studi kepustakaan.



BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

IV.1. Keadaan Umum Kecamatan Reth

a. Keadaan Geografis

Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun yang menjadi batas-batas dari kecamatan reth adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Batang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Keritang
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Batang dan Selat Berhala

Kecamatan Reth mempunyai desa/kelurahan sebanyak 9 desa dan 1 kelurahan dengan luas 407,75 Km. Pola tata desanya dipengaruhi oleh keadaan geografisnya yang merupakan daerah aliran sungai gangsal, sungai hujan dan sungai undan yaitu merupakan pola perkampungan yang berkelompok dan menyebar memanjang mengikuti 3 aliran sungai itu sendiri.

Kalau dilihat dari tekstur tanah di kecamatan reth, sebagian besar desa/kelurahannya merupakan daerah pesisir pantai. Kemudian keadaan iklim di kecamatan reth adalah beriklim tropis, dimana pergantian musim hujan dan musim kemarau sangat mendukung untuk tumbuh suburnya berbagai komoditas kelapa,

palawija dan hultikultura, hutan bakau nipah dan api-api yang tumbuh di pesisir pantai merupakan tempat berkembang biaknya biota laut. Demikian pula hutan bakau sangat menjanjikan sebagai sumber pendapatan masyarakat pesisir selain ikan dan udang.

Selanjutnya mengenai pembagian daerah/wilayah di Kecamatan Retch Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.2: Pembagian Daerah/wilayah Kec. Retch Kab. Indragiri Hilir

Daerah Tertinggal	Daerah kota/pengembangan	Daerah perkebunan/pengembangan perkebunan
1. Desa Sungai Asam	1. Kel. Pulau Kijang	1. Kel. Pulau Kijang
2. Desa Sungai Terab	2. Desa Pulau Kecil	2. Desa Pulau Kecil
3. Desa Mekar Sari	3. Desa Sanglar	3. Desa Sanglar
4. Desa Pulau Ruku	4. Desa Sungai Undan	4. Desa Seb. Sanglar
	5. Desa Seb. Pulau Kijang	5. Desa Mekar Sari
	6. Desa Seb. Sanglar	6. Desa Seb. Pulau Kijang
		7. Desa Sungai Undan

Sumber : Kantor Kecamatan Retch Indragiri Hilir, 2009

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa di kecamatan Retch terdapat 4 daerah tertinggal. Daerah ini berada di sepanjang aliran sungai undan dan sungai gangsal, dengan melihat kondisinya daerah ini perlu perkembangan dan pembinaan yang berkelanjutan untuk tumbuh dan berkembang seperti daerah lainnya. Sebagian besar mata pencaharian penduduk disini adalah sebagai nelayan dan berkebun. Kemudian terdapat 6 daerah perkotaan/pengembangan, di daerah ini

perkembangannya cukup pesat dan signifikan baik dalam agama, suku dan perekonomian. Selanjutnya terdapat juga 7 daerah perkebunan/pengembangan perkebunan, dimana kehidupan masyarakatnya tergantung dari hasil perkebunan dan pluralitas dalam agama, suku dan keadaan ekonomi masyarakatnya cukup memadai.

b. Keadaan Penduduk

Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir daerah yang penduduknya relatif padat. Penduduk keseluruhannya adalah 44.433 jiwa dengan luas 407,75 Km. Sebagian penduduk bertempat tinggal di ibukota kecamatan yaitu di kelurahan pulau kijang sebanyak 17.683 jiwa. Kemudian sebagian besar lagi penduduk tinggal di daerah aliran sungai gangsal, sungai hujan dan sungai undan yang cocok untuk areal perkebunan kelapa serta juga cocok untuk para nelayan karena daerahnya juga dekat dengan sungai yang bermuara kelaut atau selat berhala. Untuk mengetahui keadaan jumlah penduduk perdesa di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.3: Jumlah Penduduk Dirinci Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kelurahan / desa	Jumlah
1	Pulau Kijang	17.683
2	Pulau Kecil	5.462
3	Sanglar	5.872
4	Seberang Sanglar	4.163
5	Mekar Sari	1.764
6	Seberang Pulau Kijang	1.233
7	Pulau Ruku	1.451
8	Sungai Terab	2.649
9	Sungai Asam	1.504
10	Sungai Undan	2.652
	Jumlah	44.433

Sumber data : Kantor Kecamatan Reteh Indragiri Hilir, 2009

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan penduduk di Kecamatan Reteh adalah 44.433, dimana jumlah antara penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan adalah relatif berimbang. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 22.367 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 22.066 jiwa.

Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.4: Jumlah Populasi Penduduk Tiap Desa

No	Kelurahan / desa	Jumlah	
		LK	PR
1	Pulau Kijang	8.839	8.844
2	Pulau Kecil	2.722	2.740
3	Sanglar	2.966	2.906
4	Seberang Sanglar	2.074	2.089
5	Mekar Sari	876	888
6	Seberang Pulau Kijang	602	631
7	Pulau Ruku	788	663
8	Sungai Terab	1.357	1.292
9	Sungai Asam	775	729
10	Sungai Undan	1.368	1.284

Sumber data : Kantor Kecamatan Reth Indragiri Hilir, 2009

c. Mata Pencarian

Kecamatan Reth seperti pada uraian sebelumnya adalah sebagian daerahnya adalah aliran sungai gangsal, sungai hujan dan sungai undan kemudian sebagiannya lagi merupakan daerah perkebunan. Dimana daerah ini merupakan daerah produktif untuk pertanian dan perkebunan. Pada daerah yang dekat dengan sungai gangsal, sungai hujan dan sungai undan yang setiap tahunnya meluap dan meninggalkan dataran lumpur yang subur dan luas disepanjang aliran sungainya. Anugrah tanah yang subur ini dimanfaatkan betul oleh masyarakat kecamatan reth. Hasil pertanian

$$n = \frac{1609}{1 + 1609 \times (10)^{-2}}$$

$$n = \frac{1609}{1 + 1609 \times (0.1\%)^2}$$

$$n = \frac{1609}{1 + 1609 \times (0.01\%)^2}$$

$$n = \frac{1609}{17.09}$$

$$n = 94.14$$

Jadi dapat dikatakan bahwa jumlah sampel dari populasi 1.609 orang adalah sebanyak 94 orang. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah sampel dari tiap – tiap desa adalah dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel II.1: Jumlah Populasi dan Sampel

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel/ Responden	Tarif kesalahan (%)
1	Masyarakat Desa			
	berdasarkan jumlah KK :			
	- Desa Seb. Sanglar	833	49	10
	- Desa Seb. Pulau Kijang	246	14	10
	- Desa Sungai Undan	530	31	10
	Jumlah	1.609	94	10

Sumber data : Kantor Kecamatan Retch Indragiri Hilir, 2009

III.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara / metode, yaitu :

1) Wawancara (interview)

Yaitu dengan mengadakan tanya jawab dengan responden untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2) Angket (quesioner)

Yaitu dengan menyusun daftar pertanyaan alternatif jawaban yang kemudian diedarkan kepada responden untuk diisi.

III.5. Analisis Data

Setelah data dan semua bahan-bahan yang dibutuhkan terkumpulkan, penulis memisahkan dan mengelompokkan data tersebut menurut jenisnya dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase. Dalam penelitian ini data dianalisa secara deskriptif yaitu data yang diperoleh disusun berdasarkan pada tabel yang telah disesuaikan dengan daftar pertanyaan yang ada hubungannya dengan penelitian sehingga dapat diteliti berdasarkan pada teori – teori yang telah diperoleh dari studi kepustakaan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

IV.1. Keadaan Umum Kecamatan Reth

a. Keadaan Geografis

Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun yang menjadi batas-batas dari kecamatan reth adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Batang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Keritang
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Batang dan Selat Berhala

Kecamatan Reth mempunyai desa/kelurahan sebanyak 9 desa dan 1 kelurahan dengan luas 407,75 Km. Pola tata desanya dipengaruhi oleh keadaan geografisnya yang merupakan daerah aliran sungai gangsal, sungai hujan dan sungai undan yaitu merupakan pola perkampungan yang berkelompok dan menyebar memanjang mengikuti 3 aliran sungai itu sendiri.

Kalau dilihat dari tekstur tanah di kecamatan reth, sebagian besar desa/kelurahannya merupakan daerah pesisir pantai. Kemudian keadaan iklim di kecamatan reth adalah beriklim tropis, dimana pergantian musim hujan dan musim kemarau sangat mendukung untuk tumbuh subur berbagai komoditas kelapa,

palawija dan hultikultura, hutan bakau nipah dan api-api yang tumbuh di pesisir pantai merupakan tempat berkembang biaknya biota laut. Demikian pula hutan bakau sangat menjanjikan sebagai sumber pendapatan masyarakat pesisir selain ikan dan udang.

Selanjutnya mengenai pembagian daerah/wilayah di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.2: Pembagian Daerah/wilayah Kec. Reteh Kab. Indragiri Hilir

Daerah Tertinggal	Daerah kota/pengembangan	Daerah perkebunan/pengembangan perkebunan
1. Desa Sungai Asam	1. Kel. Pulau Kijang	1. Kel. Pulau Kijang
2. Desa Sungai Terab	2. Desa Pulau Kecil	2. Desa Pulau Kecil
3. Desa Mekar Sari	3. Desa Sanglar	3. Desa Sanglar
4. Desa Pulau Ruku	4. Desa Sungai Undan	4. Desa Seb. Sanglar
	5. Desa Seb. Pulau Kijang	5. Desa Mekar Sari
	6. Desa Seb. Sanglar	6. Desa Seb. Pulau Kijang
		7. Desa Sungai Undan

Sumber : Kantor Kecamatan Reteh Indragiri Hilir, 2009

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa di kecamatan Reteh terdapat 4 daerah tertinggal. Daerah ini berada di sepanjang aliran sungai undan dan sungai gangsal, dengan melihat kondisinya daerah ini perlu perkembangan dan pembinaan yang berkelanjutan untuk tumbuh dan berkembang seperti daerah lainnya. Sebagian besar mata pencaharian penduduk disini adalah sebagai nelayan dan berkebun. Kemudian tedapat 6 daerah perkotaan/pengembangan, di daerah ini

perkembangannya cukup pesat dan signifikan baik dalam agama, suku dan perekonomian. Selanjutnya terdapat juga 7 daerah perkebunan/pengembangan perkebunan, dimana kehidupan masyarakatnya tergantung dari hasil perkebunan dan pluralitas dalam agama, suku dan keadaan ekonomi masyarakatnya cukup memadai.

b. Keadaan Penduduk

Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir daerah yang penduduknya relatif padat. Penduduk keseluruhannya adalah 44.433 jiwa dengan luas 407,75 Km. Sebagian penduduk bertempat tinggal di ibukota kecamatan yaitu di kelurahan pulau kijang sebanyak 17.683 jiwa. Kemudian sebagian besar lagi penduduk tinggal di daerah aliran sungai gangsal, sungai hujan dan sungai undan yang cocok untuk areal perkebunan kelapa serta juga cocok untuk para nelayan karena daerahnya juga dekat dengan sungai yang bermuara kelaut atau selat berhala. Untuk mengetahui keadaan jumlah penduduk perdesa di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.3: Jumlah Penduduk Dirinci Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kelurahan / desa	Jumlah
1	Pulau Kijang	17.683
2	Pulau Kecil	5.462
3	Sanglar	5.872
4	Seberang Sanglar	4.163
5	Mekar Sari	1.764
6	Seberang Pulau Kijang	1.233
7	Pulau Ruku	1.451
8	Sungai Terab	2.649
9	Sungai Asam	1.504
10	Sungai Undan	2.652
	Jumlah	44.433

Sumber data : Kantor Kecamatan Reteh Indragiri Hilir, 2009

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan penduduk di Kecamatan Reteh adalah 44.433. dimana jumlah antara penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan adalah relatif berimbang. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 22.367 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 22.066 jiwa.

Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.4: Jumlah Populasi Penduduk Tiap Desa

No	Kelurahan / desa	Jumlah	
		LK	PR
1	Pulau Kijang	8.839	8.844
2	Pulau Kecil	2.722	2.740
3	Sanglar	2.966	2.906
4	Seberang Sanglar	2.074	2.089
5	Mekar Sari	876	888
6	Seberang Pulau Kijang	602	631
7	Pulau Ruku	788	663
8	Sungai Terab	1.357	1.292
9	Sungai Asam	775	729
10	Sungai Undan	1.368	1.284

Sumber data : Kantor Kecamatan Reteh Indragiri Hilir, 2009

c. Mata Pencabarian

Kecamatan Reteh seperti pada uraian sebelumnya adalah sebagian daerahnya adalah aliran sungai gangsal, sungai hujan dan sungai undan kemudian sebagiannya lagi merupakan daerah perkebunan. Dimana daerah ini merupakan daerah produktif untuk pertanian dan perkebunan. Pada daerah yang dekat dengan sungai gangsal, sungai hujan dan sungai undan yang setiap tahunnya meluap dan meninggalkan dataran lumpur yang subur dan luas disepanjang aliran sungainya. Anugrah tanah yang subur ini dimanfaatkan betul oleh masyarakat kecamatan retel. Hasil pertanian

yang terdapat di kecamatan retel adalah seperti berbagai macam jenis sayur-sayuran, jagung dan padi. Selanjutnya mata pencaharian yang ada di kecamatan retel adalah menangkap ikan atau sebagai nelayan.

d. Kehidupan Keagamaan

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari pada manusia. Kebebasan beragama di Negara Republik Indonesia di jamin dalam batang tubuh UUD 1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dalam pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan umat beragama, tidak mencampur adukan kepercayaan.

Dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditangani oleh falsafah Negara Pancasila, dikenal ada tiga kerukunan beragama itu adalah :

- a. Kerukunan umat beragama dengan seagama
- b. Kerukunan umat beragama dengan agama lain
- c. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah

Untuk melihat pemeluk agama yang tumbuh dan berkembang di Kecamatan Reth dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.5: Jumlah Pemeluk Agama Di Kecamatan Reth

No	Pemeluk Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	42.695	99,37
2	Protestan	144	0,36
3	Katolik	48	0,12
4	Hindu	-	-
5	Budha	60	0,15
	Jumlah	42.869	100

Sumber data : Kantor Kecamatan Reth Indragiri Hilir, 2009

Dari data diatas memperlihatkan bahwa pemeluk agama mayoritas adalah beragama islam yaitu sebanyak 42.695 atau 99,37%. Sedangkan yang minoritas adalah beragama katolik yaitu sebanyak 48 orang atau 0,12%. Walaupun islam sebagai agama yang mayoritas, tidak ada penekanan atau pemaksaan dari agama yang mayoritas ke agama yang minoritas. Hal ini membuktikan telah mantapnya toleransi antar umat beragama, kerukunan umat beragama serta kesadaran untuk mengonulkan pnceaslla.

Untuk menjalankan ritual kepada Tuhan Yang Maha Esa, sangat didukung oleh sarana dan prasarana untuk itu. Adapun sarana dan prasarana untuk ritual adalah tempat peribadatan. Dimana tempat peribadatan ini selain dari tempat ibadah juga merupakan salah satu saluran yang penting untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan dalam rangka mensosialisasikan suntu pembangunan kepada

masyarakat. Banyaknya tempat peribadatan di kecamatan Reth dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.6: Jumlah Sarana Ibadah Di Kecamatan Reth

No	Pemeluk Agama	Jumlah	Persentase
1	Mesjid	42	33,33
2	Musholah / Surau	102	66,67
	Jumlah	144	100

Sumber data : Kantor Kecamatan Reth Indragiri Hilir, 2009

Tabel diatas memperlihatkan bahwa terdapat 42 mesjid dan 82 musholah / surau sedangkan untuk tempat ibadah bagi agama kristen baik protestan ataupun katolik dan agama budha serta hindu yaitu gereja, wihara, dan kelenteng tidak ada. Hal ini dapat dimaklumi karena jumlah pemeluk ngamanya sedikit.

e. Pendidikan

Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di kecamatan reth. Pendidikan perlu ditunjang oleh prasarana yang memadai. Pada umumnya, prasarana pendidikan berupa gedung-gedung sekolah yang ada di wilayah kecamatan Reth boleh dikatakan hampir seluruhnya tersedia kecuali perguruan tinggi, tetapi prasarana pendidikan yang tersedia sudah dapat dikatakan telah mencukupi sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena ditunjang dengan adanya

partisipasi yang dilakukan oleh pihak swasta yang sangat menunjang dunia pendidikan yang ada di kecamatan reteh. Jumlah gedung-gedung sekolah yang ada telah mampu untuk menampung sebagian besar penduduk pada usia sekolah, bahkan banyak diantara murid – murid yang berasal dari kecamatan lain ataupun kabupaten lain misalnya pendidikan SLTA banyak diminati oleh pelajar – pelajar yang datang dari luar kecamatan reteh.

Untuk mengetahui jumlah prasarana pendidikan di kecamatan reteh dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.7: Jumlah Sarana Pendidikan Di Kecamatan Reteh

No	Jenis Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	TK	-	5	5
2	SD/MI	34	31	65
3	SMP/MTs	3	20	23
4	SMA/MA	2	10	12
	Jumlah	39	66	105

Sumber data : UPTD DIKPORA Kec. Reteh, 2010

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa prasarana pendidikan yang paling banyak adalah pembangunan gedung Sekolah Dasar. Berikutnya adalah prasarana gedung Sekolah Menengah Pertama, prasarana gedung Sekolah Menengah Atas dan prasarana gedung sekolah TK.

Antara prasarana yang dibangun oleh pihak swasta dengan prasarana pendidikan yang dibangun oleh pemerintah jumlahnya cukup jauh berbeda, dimana di kecamatan reteh terdapat 66 gedung prasarana yang dibangun oleh pihak swasta

sedangkan 39 gedung prasarana yang dibangun oleh pihak pemerintah. Ini membuktikan bahwa pihak swasta yang ada di kecamatan reteh sangat berpartisipasi dalam peningkatan sumber daya manusia yang ada dari segi pendidikannya.

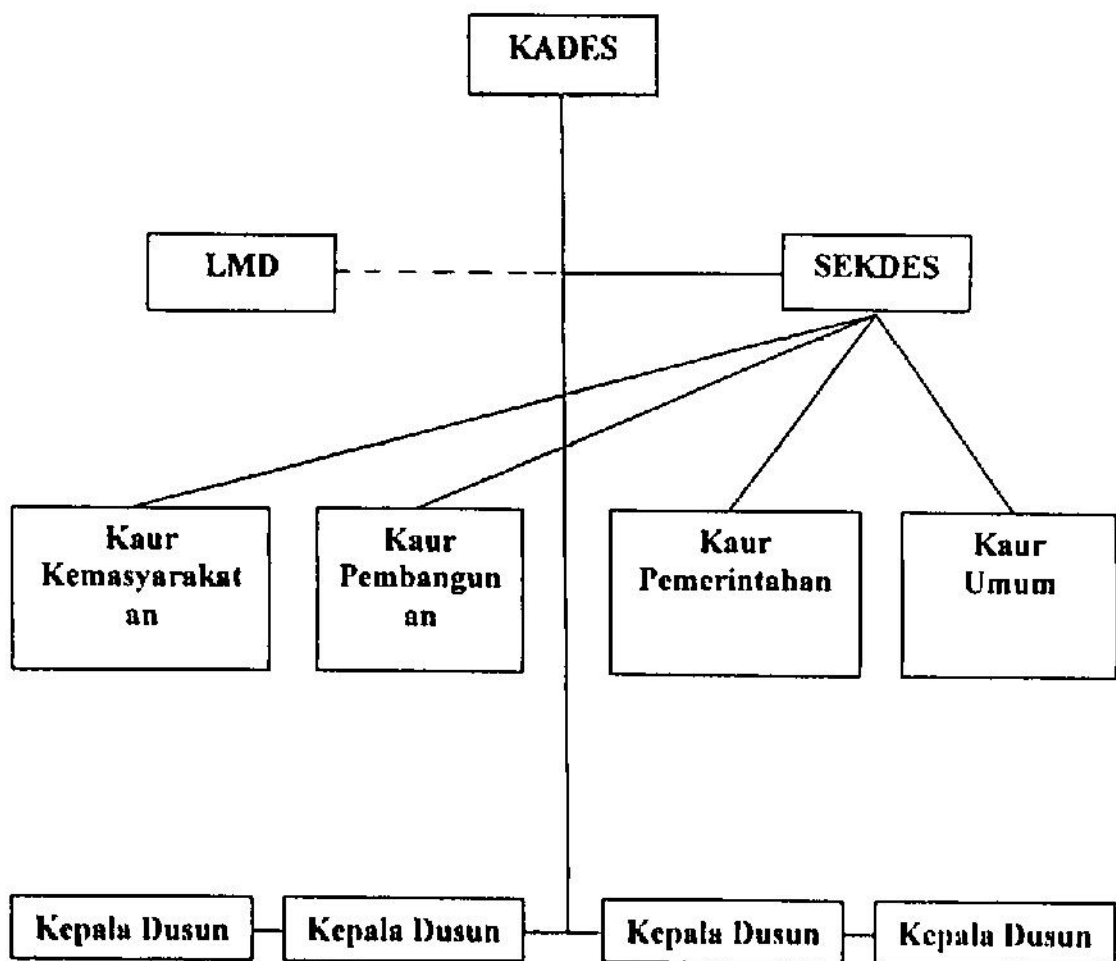
f. Struktur Pemerintahan

Tugas – tugas pemerintahan pada umumnya adalah melayani berbagai kepentingan masyarakat (penduduk) dalam berbagai segi kehidupan mulai dari masalah keamanan dan ketertiban, kesehatan, kependudukan dan sebagainya.

Kecamatan reteh terdiri dari 9 desa dan 1 kelurahan, sebagai lembaga sosial milik pemerintah harus memberikan sumbangan yang besar dalam *welfare state* sesuai dengan amanah pembukaan UUD 1945 Bab IV yang berbunyi :
".....memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia....."

Menurut SP. Siagian, suatu organisasi yang bagus bukanlah menciptakan dan mendudukan orang – orang dalam suatu jabatan, tetapi bagaimana memfungsikan orang – orang yang duduk di dalam suatu jabatan. Untuk melihat struktur organisasi pemerintah desa di kecamatan reteh dapat dilihat pada skema berikut :

Bagan : Struktur organisasi pemerintah desa di Kecamatan Retch



Ket :

Jumlah Kepala Dusun (Kadus) di sesuaikan dengan kenyataan

Sumber : Kantor Kepala Desa

g. Kedudukan, tugas dan fungsi

Untuk menegaskan pola dan tata pembagian serta hubungan kerja pada unsur – unsur organisasi pemerintahan desa, kedudukan, tugas dan fungsi unit kerja dalam struktur organisasi pemerintahan desa dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Desa :

- a) Berkedudukan sebagai alat pemerintah dan unit pelaksanaan pemerintahan desa.
- b) Tugasnya menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, urusan pemerintahan, melaksanakan kegiatan pembangunan dan pembinaan masyarakat, menumbuhkembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat.
- c) Fungsi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan rumah tangga, melaksanakan koordinasi, menggerakkan peran masyarakat dalam pembangunan, melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya.

b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Masyarakat :

- a) Berkedudukan sebagai wadah permusyawaratan/pemufakatan dari pemuka masyarakat yang ada di desa yang bersangkutan.
- b) Bertugas menampung menyalurkan pendapat masyarakat

- c) Berfungsi menyampaikan bahan masukan bagi penyusunan keputusan desa dan membina hubungan baik antara pemerintah desa dengan masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

c. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa :

- a) Berkedudukan sebagai unsur pelayanan atau staf dibidang tata usaha kepala desa dan memimpin sekretaris desa.
- b) Bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan dan pelaksanaan administrasi pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan serta memberi pelayan ketatausahaan kepada kepala desa.
- c) Fungsinya melaksanakan urusan surat – surat, kearsipan dan laporan, melaksanakan urusan keuangan dan urusan administrasi umum serta melaksanakan tugas kepala desa dalam hal bila kepala desa berhalangan.

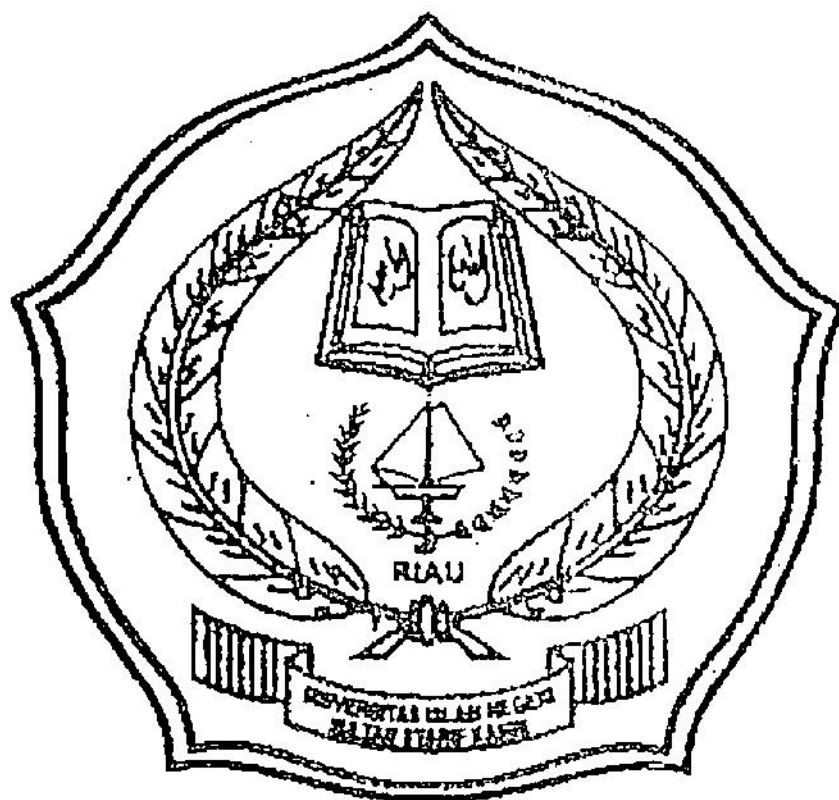
d. Kedudukan, Tugas dan Fungsi kepala Urusan :

- a) Berkedudukan sebagai pembantu bidang tugas masing – masing.
- b) Bertugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan dalam bidang tugasnya masing – masing.
- c) Berfungsi melaksanakan pencatatan, pengumpulan dan pengelolaan data / informasi yang menyangkut bidang tugas masing – masing.

e. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa :

- a) Berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya.

- b) Bertugas melaksanakan pemerintahan desa dibawah kepemimpinan kepala desa di wilayah kerjanya.
- c) Berfungsi melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan di wilayah kerjanya serta melaksanakan keputusan desa dan kebijaksanaan kepala desa.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai "Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir", selanjutnya pada bagian penutup dari rangkaian penulisan skripsi ini penulis akan menyajikan beberapa kesimpulan dari pembahasan serta saran yang dapat disumbangkan, yakni :

1. Fungsi kepala desa sebagai administrator pembangunan di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, hasilnya dilihat dari kemampuan kepala desa dalam membuat perencanaan, kemampuan kepala desa dalam memberikan pengarahan, kemampuan kepala desa mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan, kemampuan kepala desa mengawasi aktivitas – aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan, ternyata kepala desanya " kurang mampu ", hal ini ditandai dengan rata – rata dari hasil keseluruhan indikator tersebut menunjukkan sebesar 44 % dari jumlah responden mengatakan demikian. Dan hanya satu kemampuan saja yang dinyatakan " cukup mampu " dari lima kemampuan yang ada yaitu kemampuan kepala desa dalam mengawasi aktivitas – aktivitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dapat dilihat pada Tabel.III.8.

Kemudian responden juga dapat juga dilihat berdasarkan jenis kelamin. Berikut tabel tentang identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel III.2 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tamat SD	34	36
2	Tamat SMP	46	49
3	Tamat SMA	14	15
4	Tamat Akademi (D3)	-	-
5	Tamat S1 (Sarjana)	-	-
	Jumlah	94	100%

Sumber data : Hasil penelitian lapangan, 2010

Dari tabel III.2 diatas, dapat diketahui tingkat pendidikan responden di Kecamatan Retch Kabupaten Indragiri Hilir, dimana yang paling banyak adalah responden yang memiliki tingkat pendidikan SMP yakni sebanyak 46 orang atau 49%, selebihny tamat SD 34 orang atau 36%, tamat SMA ada 14 orang atau 15%, tamat Akademi (D3), dan Sarjana (S1) tidak ada.

V.2. Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Kecamatan Retch Kabupaten Indragiri Hilir.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa : desa adalah merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah orang atau penduduk yang

mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintah untuk melaksanakan tugas – tugas pemerintah dan pembangunan dipedesaan. Untuk melaksanakan tugas – tugas pembangunan di pedesaan tersebut diperlukan seorang pimpinan atau kepala desa yang memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi kepala desa itu sendiri sebagai administrator pembangunan di desanya.

Selubungan dengan hal tersebut diatas di Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa yang ada diwilayahnya dilihat dari kemampuan kepala desa sebagai administrator pembangunan, yakni sebagai berikut :

1. Mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, yaitu :

Kepala desa memiliki kemampuan membuat perencanaan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Pada penelitian ini ada 3 desa sampel, dimana perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Desa Seberang Sanglar

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan adalah antara lain :

• Cor beton, target $\pm 2 \times 1000$ m, realisasinya $\pm 2 \times 150$ m

- Rehab Sekolah : a. SDN 006 target 3 ruangan, realisasinya 2 ruangan

b, SDN 035 target 3 ruangan, realisasinya 1 ruangan dan

1 Toilet.

2. Desa Seberang Pulau Kijang

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dalam pembangunan badan jalan, target $\pm 4 \times 4500$ m, realisasinya $\pm 3.5 \times 1200$ m.

3. Desa Sungai Undan

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan adalah Pembangunan Rumah Layak Huni, target yang ingin dibangun 25 unit rumah, realisasinya hanya 7 unit rumah.

Dari hasil tanggapan responden mengenai kemampuan kepala desa membuat perencanaan pembangunan di Kecamatan Reteh kabupaten Indragiri Hilir dapat diketahui pada tabel III.3. sebagai berikut :

Tabel III.3 : Tanggapan Responden Terhadap Kemampuan Kepala Desa Membuat Perencanaan Pembangunan Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat Desa

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Mampu	22	23
2	Cukup mampu	29	31
3	Kurang mampu	43	46
	Jumlah	94	100%

Sumber data : Hasil penelitian lapangan, 2010

Dari tabel III.3. diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan kepala desa membuat perencanaan pembangunan di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir termasuk pada kategori " kurang mampu " sebanyak 43

orang responden atau 46%, dan tanggapan responden pada kategori " cukup mampu " ada 29 orang atau 31%, selanjutnya pada kategori " mampu " ada 22 orang atau 23%. Tanggapan responden termasuk pada kategori " cukup mampu " dikarenakan kepala desa kurang memiliki kemampuan membunt perencanaan pembangunan dalam hal pembangunan sosial dan budaya.

2. Mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam pelaksanaan pembangunan, yakni :

Kepala desa mampu memberikan pengarahan kepada aparatnya maupun kepada masyarakat desa dapat menjelaskan arti pentingnya pelaksanaan pembangunan desa dan manfaat pembangunan bagi masyarakat desa itu sendiri, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan ide – ide dan saran – sarannya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kepala desa sampel dalam pelaksanaan pembangunan di desanya senantiasa menjelaskan arti pentingnya pelaksanaan pembangunan desa tersebut, dan kadang – kadang meminta saran – saran/ide – ide dari masyarakat tentang pelaksanaan tersebut.

Adapun tanggapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan dapat diketahui pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.4 : Tanggapan Responden Terhadap Kemampuan Kepala Desa Memberikan Pengarahan Kepada Bawahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Mampu	18	19
2	Cukup mampu	25	27
3	Kurang mampu	51	54
	Jumlah	94	100%

Sumber data : Hasil penelitian lapangan, 2010

Dari tabel III.4 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan kepala desa memberikan pengarahan di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir termasuk pada kategori " kurang mampu " sebanyak 51 orang responden atau 54%, dan tanggapan responden pada kategori " cukup mampu " ada 25 orang atau 27%, selanjutnya pada kategori " mampu " ada 18 orang atau 19%.

Tanggapan responden termasuk pada kategori " kurang mampu " dikarenakan kepala desa kurang memiliki kemampuan memberikan pengaruh tentang arti pentingnya pelaksanaan pembangunan di desa, serta manfaat pembangunan desa bagi masyarakat desa itu sendiri dan tidak mau meminta saran – saran/ide – ide kepada masyarakat mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan.

3. Mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan, yaitu :

Kepala desa mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa dan mengadakan musyawarah dengan masyarakat desa mengenai pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kepala Desa di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, dilakukan melalui musyawarah dengan :

- Apunt desa
- Pemuka masyarakat
- Masyarakat desa

Hal – hal yang dibicarakan dalam musyawarah tersebut meliputi :

- Rencana pembangunan yang akan diadakan
- Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pembangunan tersebut
- Pemanfaatan potensi desa
- Tenaga dan peralatan/bahan – bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut
- Jenis – jenis partisipasi masyarakat yang diperlukan

Adapun tanggapan responden mengenai kemampuan kepala desa mengambil keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dapat diketahui pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.5 : Tanggapan Responden Terhadap Kemampuan Kepala Desa Mengambil Keputusan Dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Mampu	20	21
2	Cukup mampu	28	30
3	Kurang mampu	46	49
	Jumlah	94	100%

Sumber data : Hasil penelitian lapangan, 2010

Dari tabel III.5 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan kepala desa mengambil keputusan dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir termasuk pada kategori " kurang mampu " sebanyak 46 orang responden atau 49%, dan tanggapan responden pada kategori " cukup mampu " ada 28 orang atau 30%, selanjutnya pada kategori " mampu " ada 20 orang atau 21%.

Tanggapan responden termasuk pada kategori " kurang mampu " dikarenakan kepala desa kurang memiliki kemampuan mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan mengajak aparat desa, pemuka masyarakat, dan masyarakat desa untuk mengikuti musyawarah mengenai pembangunan yang akan diadakan, sehingga musyawarah tersebut hanya kadang – kadang dilakukan. Adapun yang dimusyawarahkan tersebut meliputi :

- Rencana pembangunan yang akan diadakan

- Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pembangunan tersebut
- pemanfaatan potensi desa
- Tenaga dan peralatan/bahan – bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut
- Jenis – jenis partisipasi masyarakat yang diperlukan

4. Mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa, yaitu :

Kepala desa memiliki kemampuan mengkoordinir penyelenggaraan tugas pembangunan (melakukan pembagian tugas terhadap aparat desa dan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan).

Dalam hal mengkoordinir penyelenggaraan tugas pembangunan, kepala desa telah melakukan pembagian tugas terhadap :

- Aparat desa
- Masyarakat desa

Pembagian tugas tersebut meliputi :

- pengadaan bahan dan peralatan
- pengerjaan bangunan dan sebagainya

Adapun tanggapan responden mengenai kemampuan mengkoordinir penyelenggaraan tugas pembangunan dapat diketahui pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.6 : Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Mengkoordinir Penyelenggaraan Tugas Pembangunan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Mampu	21	22
2	Cukup mampu	31	33
3	Kurang mampu	42	45
	Jumlah	94	100%

Sumber data : Hasil penelitian lapangan, 2010

Dari tabel III.6 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan kepala desa mengkoordinir penyelenggaraan tugas pembangunan di Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir termasuk pada kategori " kurang mampu " sebanyak 42 orang responden atau 45%, dan tanggapan responden pada kategori " kurang mampu " ada 31 orang atau 33%, selanjutnya pada kategori " mampu " ada 21 orang atau 22%.

Tanggapan responden termasuk kategori " kurang mampu " dikarenakan kepala desa kurang memiliki kemampuan mengkoordinir penyelenggaraan tugas pembangunan dan mengadakan pembagian tugas terhadap aparat desa, masyarakat desa yang meliputi pengadaan bahan dan peralatan, pengerjaan bangunan, sehingga kadang – kadang pengadaan bahan tersebut mengalami keterlambatan.

5. Mampu mengawasi aktivitas – aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa, yaitu :

Kepala desa memiliki kemampuan mengadakan pengawasan terhadap kegiatan – kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Sehubungan dengan hal tersebut diatas kepala desa telah melakukan pengawasan dalam proses penyelenggaraan pembangunan tersebut, dengan meninjau lokasi dimana pembangunan sedang dilaksanakan.

Adapun tanggapan responden mengenai kemampuan mengawasi aktivitas – aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan tersebut dapat diketahui pada tabel berikut ini :

Tabel III.7 : Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Mengawasi Aktivitas – Aktivitas Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Mampu	21	28
2	Cukup mampu	46	49
3	Kurang mampu	27	34
	Jumlah	94	100%

Sumber data : Hasil penelitian lapangan, 2010

Dari tabel III.7 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan kepala desa Mengawasi Aktivitas - Aktivitas Dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir

termasuk pada kategori " cukup mampu " sebanyak 46 orang responden atau 49%, dan tanggapan responden pada kategori " kurang mampu " ada 32 orang atau 34%, selanjutnya pada kategori " mampu " ada 26 orang atau 28%.

Tanggapan repouden termasuk pada kategori " cukup mampu " dikarenakan kepala desa telah melakukan peninjauan dalam proses penyelenggaraan pembangunan tersebut dengan meninjau langsung kelokasi dimana pembangunan sedang dilaksanakan (2 bulan sekali).

Dari indikator – indikator variabel pada penelitian ini, maka selanjutnya dapatlah disimpulkan rekapitulasi tanggapan responden mengenai fungsi kepala desa sebagai administrator pembangunan di Kecamatan Retch Kabupaten Indragiri Hilir pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.8 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Kecamatan Rethel Kabupaten Indragiri Hilir

No	Fungsi kepala desa sebagai administrator pembangunan	Tanggapan responden			Jumlah (%)
		Mampu	Cukup Mampu	Kurang Mampu	
1	Mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa	22 (23 %)	29 (31 %)	43 (46 %)	94 (100%)
2	Mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam pelaksanaan pembangunan	18 (19 %)	25 (27 %)	51 (54 %)	94 (100%)
3	Mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan	20 (21 %)	28 (30 %)	46 (49 %)	94 (100%)
4	Mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa	21 (22 %)	31 (33 %)	42 (45 %)	94 (100%)
5	Mampu mengawasi aktivitas – aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan	21 (28 %)	46 (49 %)	27 (34 %)	94 (100%)
Jumlah		102	159	209	470
Rata - rata		20 (22 %)	32 (34 %)	42 (44 %)	100

Sumber data : Hasil penelitian lapangan, 2010

Dari tabel III.8 diatas merupakan rekapitulasi tanggapan responden mengenai fungsi kepala desa sebagai administrator pembangunan di Kecamatan Rethel Kabupaten Indragiri Hilir, ternyata dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

Tanggapan responden pada kategori " mampu " ada 20 orang atau 22%, dan tanggapan responden pada kategori " cukup mampu " ada 32 orang atau 34%, serta tanggapan responden pada kategori " kurang mampu " ada 42 orang atau 44%.

Dari hasil penelitian tersebut ternyata fungsi kepala desa sebagai administrator pembangunan di Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir termasuk pada kategori " kurang mampu " yakni sebanyak 42 orang responden atau 44% yang memberi tanggapan dari 94 orang jumlah responden secara keseluruhan.

V.3. Hambatan – Hambatan Dalam Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir Adalah Sebagai Berikut :

1. Dalam hal kemampuan membuat perencanaan sesuai dengan kebutuhan desa adalah :
 - Masih adanya tingkat pendidikan kepala desa yang rendah
 - Tidak terkumpulnya data mengenai data potensi desa
 - Banyaknya keinginan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan
 - Sulitnya menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan tersebut
2. Dalam hal kemampuan memberikan pengarahan kepada bawahan dalam pelaksanaan pembangunan adalah :
 - Sulitnya mengumpulkan masyarakat desa untuk diberikan pengarahan mengenai pelaksanaan pembangunan yang akan diadukan, karena rata – rata masyarakat berada di rumah pada waktu sore atau malam hari
 - Rendahnya sumber daya masyarakat dalam menyerap pengarahan yang diberikan (rata – rata tamat SD dan SMP)

- Pengarahan yang diberikan kurang dijelaskan arti pentingnya pelaksanaan pembangunan tersebut
 - Kurangnya kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan saran – saran atau ide – idenya dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut
3. Dalam hal kemampuan mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan adalah :
- Rendahnya sumber daya kepala desa
 - Keputusan yang diambil selalu dihadiri oleh aparat desa dan pemuka masyarakat, sedangkan masyarakat hanya kadang – kadang saja
 - Keputusan yang diambil kurang dimusyawarahkan dengan masyarakat desa
4. Dalam hal kemampuan mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa adalah :
- kurangnya kemampuan kepala desa untuk menkoordinir tugas – tugas dalam proses penyelenggaraan pembangunan
 - Kurang jelasnya pembagian tugas dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut
 - Tugas yang diberikan kurang dapat direalisasikan sesuai dengan rencana
5. Dalam hal kemampuan mengawasi aktivitas – aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa adalah :
- Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa terhadap pelaksanaan pembangunan



BAB V

PEMBAHASAN

V.1. Identitas Responden

Sebelum masuk kepada pembahasan penelitian ini, maka akan terlebih dahulu dibahas tentang responden penelitian. Hal ini dikemukakan sebagai bahan pengetahuan bagi para pembaca dan memperjelas arah penelitian.

Responden dalam penelitian ini semuanya berjumlah 94 orang, yang seluruhnya merupakan masyarakat desa tersebut. Berikut tabel mengenai identitas responden berdasarkan jenis kelamin responden :

Tabel III.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki – laki	72	77
2	Perempuan	22	23
Jumlah		94	100%

Sumber data : Hasil penelitian lapangan, 2010

Dari tabel III.1 diatas dapat diketahui jenis kelamin responden di Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir, yang paling banyak adalah responden yang memiliki jenis kelamin laki – laki sebanyak 72 orang atau 77%, dan selebihnya responden yang memiliki jenis kelamin perempuan ada 22 orang atau 23%.

2. dari hasil penelitian mengenai fungsi kepala desa sebagai administrator pembangunan di Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir ternyata dari 5 (lima) indikator variabel yang digunakan dalam mengukur keberhasilan kepala desa sebagai administrator pembangunan di Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir, dari hasil tanggapan responden termasuk pada kategori " kurang mampu " yakni sebanyak 42 orang responden atau 44% yang memberikan tanggapannya, dan 32 orang responden atau 34% yang memberikan tanggapan " cukup mampu ", selanjutnya 20 orang responden atau 22% yang memberikan tanggapan " mampu ". Hal ini dapat dilihat pada Tabel.III.8.
3. Hambatan – hambatan dalam pelaksanaan fungsi kepala desa sebagai administrator pembangunan di Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :
 1. Dalam hal kemampuan membuat perencanaan sesuai dengan kebutuhan desa adalah
 - Masih adanya tingkat pendidikan kepala desa yang rendah
 - Tidak terkumpulnya data mengenai data potensi desa
 - Banyaknya keinginan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan
 - Sulitnya menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan tersebut

2. Dalam hal kemampuan memberikan pengarahannya kepada bawahan dalam pelaksanaan pembangunan adalah :
 - Sulitnya mengumpulkan masyarakat desa untuk diberikan pengarahannya mengenai pelaksanaan pembangunan yang akan diadakan, karena rata – rata masyarakat berada di rumah pada waktu sore atau malam hari
 - Rendahnya sumber daya masyarakat dalam menyerap pengarahannya yang diberikan (rata – rata tamat SD dan SMP)
 - Pengarahannya yang diberikan kurang dijelaskan arti pentingnya pelaksanaan pembangunan tersebut
 - Kurangnya kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan saran – saran atau ide – idenya dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut
3. Dalam hal kemampuan mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan adalah :
 - Rendahnya sumber daya kepala desa
 - Keputusan yang diambil selalu dilindiri oleh aparat desa dan pemuka masyarakat, sedangkan masyarakat hanya kadang – kadang saja
 - Keputusan yang diambil kurang dimusyawarahkan dengan masyarakat desa
4. Dalam hal kemampuan mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa adalah :

- kurangnya kemampuan kepala desa untuk menkoordinir tugas – tugas dalam proses penyelenggaraan pembangunan
 - Kurang jelasnya pembagian tugas dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut
 - Tugas yang diberikan kurang dapat direalisasikan sesuai dengan rencana
5. Dalam hal kemampuan mengawasi aktivitas – aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa adalah :
- Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa terhadap pelaksanaan pembangunan
 - Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan kurang tepat waktu dalam penyelesaiannya
 - Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut kurang sesuai dengan realisasinya
 - Pembangunan yang telah dilaksanakan kurang dilaksanakan pemeliharannya

VI.2. Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis dapat membuat saran -- saran yang akan menjadi masukan bagi pihak – pihak yang terkait yaitu :

1. Diharapkan agar kepala desa memiliki kemampuan dalam membuat perencanaan, maka kepala desa dapat hendaknya mengikuti pelatihan –

pelatihan yang berkaitan dengan pembuatan program pelaksanaan pembangunan di pedesaan.

2. Agar kepala desa mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat desa, perlu kiranya kepala desa tersebut lebih memperjelas lagi kepada masyarakat tentang arti pentingnya pelaksanaan pembangunan dan manfaat pembangunan di desa. Dan dalam hal kemampuan mengambil keputusan kepala desa hendaklah mengadakan musyawarah dengan pemuka masyarakat dan masyarakat desa tentang keputusan yang akan diambil sehingga keputusan tersebut menjadi keputusan bersama. Dalam hal kemampuan mengkoordinir penyelenggaraan tugas – tugas pembangunan, kepala desa hendaklah dapat mengadakan pembagian tugas yang jelas kepada pihak – pihak yang terkait dalam proses penyelenggaraan pembangunan tersebut.
3. Agar kepala desa dapat melakukan pengawasan secara rutin (1 bulan sekali) terhadap pelaksanaan pembangunan mulai dari proses pelaksanaan pembangunan sampai selesainya pembangunan tersebut dan mengajak masyarakat di wilayahnya untuk ikut berpartisipasi menjaga dan memelihara pembangunan yang sudah dilaksanakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Wijaya, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, Penerbit PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta, 1986.
- Arifin Abdul Rahman, *Kerangka Pokok-pokok Manajemen*, Penerbit PT. Ikhtiar Baru, Jakarta, 1991.
- Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Penerbit PT. Pustaka, Jakarta, 1996.
- Irawan, Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, Penerbit PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1995.
- Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Penerbit PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- M. Karyadi, *Kepemimpinan*, Penerbit Politia, Bogor, 1983.
- Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1998.
- Onong Uchayana Effendi, *Sistem Informasi Manajemen*, Penerbit CV. Mandar Muja, Bandung, 1992.
- Prajudi Admosudirjo, *Dasar-dasar Ilmu Administrasi*, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Soehardjono, *Kepemimpinan*, Penerbit Sangkakala, Malang 1981.
- Sondang P. Singian, *Kepemimpinan dan Perilaku*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1979.

Sondang P. Siagian, *Peranan Staf dan Manajemen*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1985.

Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 1997.

Talizuduhu Ndraha, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1992.

Talizuduhu Ndraha, *Pembangunan Desa*, Makalah Informatir Dalam Temu Ilmiah Pembangunan Desa, Jakarta, 1990.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.